

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan dapat didefinisikan sebagai salah satu kegiatan untuk merubah suatu kondisi yang lebih baik yang menyangkut sikap, pola maupun kehidupan sosial dan ekonomi suatu masyarakat pada saat ini. Dalam hal ini berarti pula bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan bathiniah dan lahiriah, tetapi keselarasan dan keserasian serta keseimbangan diantara keduanya.

Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yaitu untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat, maka dalam pelaksanaan pembanguan baik yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun daerah diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pembangunan dilaksanakan secara merata di seluruh tanah air bukan untuk suatu golongan saja tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Untuk lebih mempercepat pemerataan pembangunan, pembangunan dilaksanakan dan dibiayai oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, maupun swadaya dari masyarakat. Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Sleman telah memiliki kebijakan pelaksanaan pembangunan dengan orientasi pemberdayaan masyarakat melalui Program Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong Royong. Program ini merupakan program pemerintah daerah untuk menstimulasi pelaksanaan pembangunan di wilayah padukuhan dengan biaya bantuan dari pemerintah Kabupaten Sleman yang bertujuan untuk pemberdayaan kelembagaan dan keswadayaan masyarakat.

Guna memberikan dukungan bagi kegiatan masyarakat baik dibidang pembangunan fisik maupun non fisik, Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2008 telah menyalurkan bantuan berupa dana stimulan. Untuk kegiatan sosial kemasyarakatan pemkab telah mengucurkan dana sebesar Rp. 6.136.668.750, sedangkan bantuan untuk kegiatan pembangunan fisik Pemkab Sleman telah menyalurkan dana sebesar Rp. 9.804.000.000 Bantuan untuk sosial kemasyarakatan diperuntukkan bagi pembangunan non fisik diberikan untuk memberi dukungan bagi kegiatan pemuda, olahraga, agama, umum, PKK, dan organisasi sosial. Bantuan keuangan tersebut diberikan oleh Pemkab Sleman bertujuan untuk meningkatkan dan membantu kegiatan masyarakat, diperuntukkan bagi kelompok masyarakat bukan untuk perorangan. Khusus untuk dana gotong-royong diperuntukkan bagi pembangunan lingkungan sebesar Rp. 3.318.500.000, Pembangunan Sistem Pengumpulan Air Hujan (SPA) Rp. 471.350.000, Tempat Ibadah Rp. 454.150.000, pembangunan pengairan Rp. 986.000.000 dan pembangunan pasar desa Rp. 250.000.000.¹

Mengenai permohonan bantuan dana gotong royong prosedurnya dengan mengajukan proposal permohonan bantuan stimulan yang dibuat oleh panitia bersama-sama dukuh dilampiri rencana anggaran biaya kegiatan dan susunan panitia, selanjutnya disahkan/diketahui Pemerintah Desa dan Kecamatan setempat. Proposal tersebut diajukan kepada Bupati Sleman Cq. Camat dengan tembusan dikirim kepada Bappeda, dan Bagian Administrasi Pembangunan.

Program Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong Royong diarahkan kepada sasaran yang telah ditetapkan sesuai keputusan Bupati Nomor 32/Kep.KDH./2001 tanggal 10 Mei 2001 tentang petunjuk pelaksanaan bantuan stimulan untuk usaha swadaya masyarakat dalam pembangunan fisik. Dalam pengelolaan dan pengalokasian senantiasa akan memperhatikan terhadap

¹ Marajo, Asril Sutan, *Pembangunan Berikan Bantuan Untuk Kegiatan Masyarakat*, Pemerintah Kabupaten Sleman Online, 2008

perencanaan yang telah ditetapkan oleh panitia yang melibatkan warga masyarakat dalam merencanakan secara cermat apa yang menjadi kebutuhannya. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat.²

Program Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong Royong menstimulan pembangunan yang melibatkan langsung masyarakat melalui sub unit LKMD (Lembaga Kemasyarakatan Desa). Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini LKMD terlihat jelas dengan peran LKMD dari pengajuan proposal perencanaan pembangunan, penggerak swadaya masyarakat dengan penghimpunan dana melalui perkumpulan RT, sampai pelaksanaan pembangunan yang dikoordinasi oleh LKMD.

Besarnya Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong Royong yang diberikan pada masing-masing padukuhan tidak sama tergantung proposal yang diajukan oleh panitia pembangunan di tingkat padukuhan atau pengurus sub unit Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Apabila program pembangunan padukuhan yang diajukan panitia memerlukan biaya yang sangat besar biasanya bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dana Bantuan Gotong Royong juga relative besar, namun demikian masih didukung dengan dana atau biaya yang didapat melalui iuran/bantuan dari warga masyarakat atau dana swadaya masyarakat.

Dalam tulisan ini penyusun mengambil studi kasus mengenai pelaksanaan Program Bantuan Kemasyarakatan Gotong Royong di Desa Lumbungrejo, Kecamatan Tempel. Desa Lumbungrejo merupakan salah satu desa percontohan untuk program pembangunan desa untuk wilayah Kecamatan Tempel, termasuk program dana bantuan kemasyarakatan gotong royong. LKMD Lumbungrejo telah mengajukan proposal perencanaan pembangunan desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2008. Karena dalam prakteknya pembangunan di setiap

² *Ibid*

padukuhan belum tentu selesai 1 tahun, sedangkan anggaran bantuan yang diberikan pemerintah secara bertahap yakni turun satu kali dalam jangka waktu setahun. Oleh karena itu, peran LKMD Lumbungrejo sangat dibutuhkan dalam penghimpunan dana dan swadaya masyarakat seperti tenaga, pikiran, barang material, makanan, dan lain-lain.

Program pembangunan desa dengan bantuan dana kemasyarakatan gotong royong yang sedang berjalan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Desa Lumbungrejo. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan sarana prasarana maupun ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah program ini berjalan:

Tabel 1.1
PERBEDAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN EKONOMI MASYARAKAT
SEBELUM DAN SESUDAH PROGRAM PEMBANGUNAN DESA LUMBUNGREJO
TAHUN 2006-2008

No	Keterangan	Sebelum	Sesudah
1	Infrastruktur jalan desa	Kebanyakan masih berbentuk jalan bebatuan	60% jalan sudah berbentuk jalan conblok atau sudah disemenisasi
2	Infrastruktur tempat ibadah	Banyak tempat ibadah yang rusak dan tidak	Banyak tempat ibadah yang mengalami

		permanen	perbaiki atau renovasi
3	Ekonomi masyarakat	Statis karena terhambat biaya distribusi hasil produksi yang mahal	Mengalami cukup peningkatan dengan lancarnya distribusi

Sumber : Data Terolah LKMD Desa Lumbunrejo

Berdasarkan table di atas menunjukkan bahwa Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong Royong sangat membantu meringankan dalam menyelesaikan pembangunan desa di Desa Lumbunrejo yang dalam prakteknya memerlukan dana yang cukup besar. Di sisi lain kenaikan harga bahan-bahan material seperti semen, pasir, dan lainnya, tidak bisa dihindarkan. Sehingga mengakibatkan pengeluaran dana program akan menjadi lebih besar dari yang diestimasikan sebelumnya. LKMD Lumbung Rejo tentunya harus bekerja keras mewujudkan program-program pembangunan desa dengan dana yang ada. Untuk itu penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan pembangunan di Desa Lumbunrejo dengan Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong-Royong.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana implementasi Program Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong Royong di Desa Lumbunrejo, Kecamatan Tempel Tahun 2008?***

2. *Apa saja faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi Program Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong Royong di Desa Lumbungrejo, Kecamatan Tempel Tahun 2008?*

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong Royong di Desa Lumbungrejo, Kecamatan Tempel Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat program Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong Royong di Desa Lumbungrejo, Kecamatan Tempel Tahun 2008.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan program Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong Royong di Desa Lumbungrejo, Kecamatan Tempel Tahun 2008.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih atau masukan bagi panitia dalam hal ini LKMD Desa Lumbungrejo maupun pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan program Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong Royong.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai titik tolak untuk melaksanakan penelitian sejenis secara mendalam.

E. KERANGKA DASAR TEORI

Kerangka dasar teori adalah teori–teori yang digunakan dalam melakukan penelitian sehingga penelitian ini menjadi jelas, sistematis dan ilmiah. Menurut Koentjaraningrat “teori sebagai serangkaian asumsi konsep, konstruk definisi proporsi dengan cara merumuskan hubungan antar konsep”.³

Sedangkan menurut Effendi dan Masri Singarimbun “teori adalah sarana pokok untuk mengungkapkan hubungan sistematis antar fenomena social maupun alami yang hendak di teliti”.⁴

Dari beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa teori–teori pada dasarnya merupakan penjelasan fenomena sebagai pola pikir yang sistematis yang dapat menjelaskan fenomena atau gejala. Jika suatu fenomena merupakan suatu masalah maka teori dapat di gunakan sebagai pemecah masalah, teori dapat dikatakan sebagai informasi ilmiah yang diperoleh dengan meningkatkannya suatu masalah. Berdasarkan konsep tersebut maka dapat diuraikan landasan teori yang akan digunakan sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa

1.1. Pemerintah Daerah

³ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 1981, hal. 9.

⁴ Efendi Sofian, *Unsur-unsur Penelitian Sosial, LP3ES*, Jakarta, 1985, hal. 18.

Pemerintah daerah menurut Undang–undang No. 32 Tahun 2004, Bab I ketentuan umum pasal I adalah :

“Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”

Pemerintah daerah menurut The Liang Gie adalah :

“Satuan–satuan organisasi pemerintahan yang berwenang untuk menyelegarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah. Aparatnegara yang berwenang memerintah suatu kesatuan wilayah tertentu.”⁵

Fungsi Pemerintah Daerah adalah :

- a. Fungsi pengaturan meliputi pembuatan kebijakan dan peraturan.
- b. Fungsi pemberdayaan meliputi pemberdayaan politik, social, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan.
- c. Fungsi pelayanan, meliputi :
 - a) Menjamin keamanan Negara..
 - b) Memelihara ketertiban.
 - c) Pekerjaan umum.
 - d) Meningkatkan kesejahteraan sosial.
 - e) Menjamin penerapan keadilan.
 - f) Menerapkan kebijakan ekonomi.
 - g) Memelihara sumber daya alam.

Pembagian daerah menurut Undang–Undang No 32 Tahun 2004 adalah : Negara Kesatuan Republik Indoneseia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi

⁵ The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Negara Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1976, hal. 44.

itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan pemerintahan daerah maka diperlukan perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten atau kota. Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

1.2. Desa

Desa atau kelurahan merupakan perangkat pemerintahan terkecil di negara ini.

Menurut UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2005, yang dimaksud dengan desa adalah :

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Syarat-syarat desa diantaranya adalah mempunyai wilayah, adanya penduduk, mempunyai pemerintahan, berada langsung di bawah camat, mempunyai kebiasaan-kebiasaan pergaulan sendiri. Fungsi Desa sebagai : sumber bahan pangan, penghasilan bahan mentah, penghasil tenaga kerja, pusat-pusat industri kecil.⁶

Ciri-ciri masyarakat desa diantaranya adalah : ⁷

- a. Kehidupan tergantung pada alam.

⁶ *Desa dan Kota*, Belajar Geografi.co.id

⁷ *Ibid*

- b. Toleransi sosialnya kuat.
- c. Adat-istiadat dan norma agama kuat.
- d. Kontrol sosialnya didasarkan pada hukum informal.
- e. Hubungan kekerabatan didasarkan pada *Gemeinschaft* (paguyuban).
- f. Pola pikirnya irrasional.
- g. Struktur perekonomian penduduk bersifat agraris.

2. Implementasi Kebijakan Publik

2.1 Kebijakan Publik

Secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan public adalah sebuah aturan. Kebijakan publik hadir dengan tujuan tertentu yaitu untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai tujuan (misi dan visi) bersama yang telah disepakati. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mendorong masyarakat untuk membangun daya saing masing-masing dan bukan semakin menjerumuskan kedalam pola ketergantungan. Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Kebijakan publik terdiri dari keputusan politis dalam rangka mencapai tujuan sosial masyarakat. Keputusan-keputusan ini kemudian diharapkan mempresentasikan sebuah konsensus nilai.

Kebijakan publik terdiri dari serangkaian rencana kerja atau program dan tujuan secara tertulis yang memberikan gambaran tentang apa yang ingin kita capai dengan sebuah kebijakan. Pendapat para pakar tentang kebijakan publik, yaitu :

Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.⁸

Harold D Laswell mendefinisikannya sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu nilai-nilai tertentu dan praktek tertentu.⁹

Carl I. Friedrich mendefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ditunjukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.¹⁰

Dari definisi di atas maka dapat di sederhanakan, bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah untuk mengatasi problem yang ada di masyarakat.

2.2 Implementasi Kebijakan

Produk kebijakan yang telah di sah-kan atau di tetapkan kemudian tahap berikutnya diimplementasikan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan

⁸ Riant Nugroho D, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003, hal. 3.

⁹ Ibid, hal. 3-4.

¹⁰ Ibid, hal. 4.

akan sia-sia belaka. Maka itu implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting dalam kebijakan publik.

Pendapat Pressman dan Wildavsky menyebutkan bahwa :

“Implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sasaran-sasaran tindakan mencapai tujuan tersebut atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya.”¹¹

Sementara menurut Jones disebutkan bahwa :

“Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha untuk mencari apa yang akan dan dilakukan. Dengan demikian implementasi mengatur Kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan kebijakan yang di inginkan.”¹²

Diterangkan lebih lanjut bahwa pelaksanaan atau implementasi kebijakan didalam konteks manajemen berada dalam kerangka organizing-leading controlling. Jadi, ketika kebijakan sudah di buat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut.

Penjelasan lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan menurut Grindle mengidentifikasikan ada dua hal yang menentukan keberhasilan implementasi yaitu isi kebijakan dan konteks dari implementasi itu sendiri. Isi kebijakan meliputi kepentingan siapa yang terlibat, macam-macam manfaat yang di hasilkan, siapa implementatornya dan yang terakhir adalah sumber daya yang disediakan. Sementara implementasi sendiri mencakup

¹¹ Tangkilisan, Hesel Nogi S, *Kebijakan Publik Yang Membumi Konsep, Strategi dan Kasus*, Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2003, hal. 57.

¹² Ibid, hal. 59.

kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, penguasa, dan kepatuhan dan daya tanggap pelaksana.¹³

Menurut teori George C Edwards III implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni :¹⁴

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif, sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetisis implementator, dan sumber daya financial.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

¹³ Nugroho D, Riant. *Op.Cit.* hal. 174-175.

¹⁴ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal. 90-92.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi yang panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.

Sedangkan menurut Donald Van Meter dengan Carl Van Horn menyebutkan terdapat lima variabel yang mempengaruhi kebijakan publik, yaitu :¹⁵

- a. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.
- b. Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia.
- c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktifitas. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
- d. Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi sebuah program.
- e. Kondisi sosial dan politik. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

2.3 Implementasi Program

¹⁵ Ibid, hal. 99-101

Pandangan para pakar mengenai implementasi program juga memperlihatkan berbagai kausalitas antara pelaku kebijakan dengan pencapaian tujuan kebijakan atau program. Selain itu tahap implementasi dipandang sebagai aktifitas fungsional yang dilaksanakan setelah aktifitas formulasi, legitimasi dan penganggaran kebijakan. Di bagian lain, Jones mengatakan produk implementasi ini sangat bervariasi yaitu dapat berupa pelayanan, pembayaran, kemudahan, pengawasan, dan lain-lain. Lebih lanjut Jones menjelaskan :

“Sebuah program berisi tindakan yang diusulkan pemerintah yang dalam rangka mencapainya problematis program akan ada apabila kondisi permulaan, yaitu tahapan apabila dari hipotesa kebijakan telah di rumuskan. Kata program sendiri menegaskan perubahan dari suatu hipotesa menjadi suatu tindakan pemerintah. Sedang derajat keterlaksanaan konsekuensi atau akibat yang diharapkan (yang merupakan tahapan “selanjutnya”) disebut sebagai penerapan.”¹⁶

Implementasi program pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Seperti yang dijelaskan oleh Hogwood dan Gun bahwa implementasi program mengandung resiko kegagalan yang terbagi dalam dua kategori kegagalan kebijakan yaitu tidak terimplementasikan (non implementation) dan implementasi yang tidak berhasil (unsuccessful implementation).¹⁷ Kegagalan implementasi karena kebijakan yang dilaksanakan buruk, dan kebijakan itu sendiri memang jelek.

Secara sederhana dapat ditarik pengertian bahwa program merupakan tahapan yang menghubungkan antara rencana dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, program merupakan proses penerjemahan pernyataan kebijakan. Tahap-tahap dalam proses implementasi suatu program, menurut Wahab adalah :

¹⁶ Ibid, hal. 46

¹⁷ Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hal. 11.

“Keputusan dari badan-badan pelaksana, kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap keputusan, dampak nyata keputusan-keputusan badan-badan pelaksana, persepsi terhadap dampak dan evaluasi sistem politik terhadap undang-undang berupa perbaikan mendasar dalam isinya.”¹⁸

Implementasi program memerlukan sumber daya untuk mengerjakan suatu program. Sumber daya itu meliputi personil, perlengkapan, material dan yang terpenting adalah anggaran. Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan harus terlebih dahulu menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam arahan-arahan, peraturan serta desain dan rencana program. Pelaksana yang diberi otoritas sebagai implementator program harus mengatur perencanaan dan aktifitas dengan membentuk unit-unit pelaksana serta rincian kegiatan rutin dengan beban kerjanya. Implementasi program merupakan serangkaian aktifitas yang sangat kompleks.

Implementasi berkaitan dengan akumulasi dan akusisi sumber daya yang dibutuhkan untuk menggerakkan suatu program. Sumber daya tersebut meliputi personil, perlengkapan, material, dan yang terpenting anggaran. Implementasi Program Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong-Royong dilaksanakan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Perencanaan pembangunan desa dengan Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong-Royong yang melibatkan seluruh elemen masyarakat desa guna menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dengan LKMD sebagai fasilitator.
- b. Pelaksanaan pembangunan desa dengan Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong-Royong.
- c. Pelaporan kegiatan implementasi program dan alokasi Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong-Royong.

¹⁸ Ibid, hal. 57.

Di dalam penelitian ini yang dimaksud dengan implementor program adalah LKMD Lumbung Rejo.

Dari berbagai pengertian dan definisi yang di kemukakan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan beberapa unsur pokok implementasi program, yakni :

- a. Implementasi program ialah rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah kebijakan ditetapkan, yang meliputi pengambilan keputusan, langkah-langkah operasional yang strategis untuk mewujudkan program menjadi kenyataan.
- b. Implementasi program juga senantiasa di pengaruhi oleh factor lingkungan, baik fisik, social, budaya dan politik.

2.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program

Secara umum dapat disimpulkan, bahwa model-model implementasi kebijakan atau program yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan atau program. Bertitik tolak dari kerangka pemikiran George C Edward, maka terdapat tiga faktor yang berpengaruh terhadap Implementasi Program Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong-Royong yang dilaksanakan oleh Pemkab Sleman, yaitu : organisasi pelaksana, sumber daya dan sikap pelaksana.

Dari deskripsi permasalahan Implementasi Program Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong-Royong yang telah penyusun kemukakan dan selanjutnya dikaitkan dengan beberapa kerangka pemikiran implementasi kebijakan atau program yang dikemukakan di atas, maka

Implementasi Program Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong-Royong yang dilaksanakan oleh LKMD Lumbung Rejo akan mencapai tujuannya secara efektif apabila :

- a. Organisasi pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan Program Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong-Royong mempunyai komitmen terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan atau program tersebut.
- b. Tujuan dan sasaran kebijakan atau program dapat dicapai bila sumber daya (*resources*) yang meliputi dana, sarana, dan prasarana serta jasa tersedia secara memadai.
- c. Tujuan dan sasaran kebijakan atau program dapat dicapai apabila sikap para pelaksana mendukung tercapainya Implementasi Program Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong-Royong

Hubungan variabel organisasi pelaksana, sumber daya pelaksana dan sikap pelaksana terhadap implementasi Program Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong-Royong dijelaskan sebagai berikut :

- a. Organisasi Pelaksana :

Organisasi pelaksana merupakan organisasi atau petugas (implementator) yang terlibat dalam suatu program yang memiliki struktur organisasi (desain organisasi) sebagai mekanisme-mekanisme formal untuk mencapai tujuan program. Dalam penelitian ini organisasi pelaksana adalah LKMD Lumbung Rejo.

Di dalam mekanisme organisasi pelaksana, struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, dan mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang diikuti. Oleh karena itu, struktur organisasi sangat penting bagi suatu organisasi agar mekanisme kerja dapat berjalan dengan

baik. Salah satu prinsip organisasi yang harus dipahami adalah keseimbangan antara wewenang dan tanggungjawab. Hal ini berarti struktur apapun yang digunakan harus terjalin keseimbangan antara keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab yang mencerminkan kebijakan pimpinan dalam menerapkan pola desentralisasi untuk pengambilan keputusan.

Apabila dikaitkan dengan struktur organisasi atau kelembagaan daerah di era otonomi daerah, maka pembentukan kelembagaan tidak lain guna mewadahi kewenangan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2003 tentang *Pedoman Organisasi Perangkat Daerah* menyebutkan, pembentukan organisasi perangkat daerah berdasarkan pertimbangan :

“Kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.”

b. Sumber Daya Pelaksana

Sumber daya, yaitu setiap potensi baik berupa dana, fasilitas dan tenaga kerja yang dikerahkan dan dimanfaatkan untuk mengimplementasikan Program Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong-Royong. Situasi tersebut sangat relevan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di era otonomi daerah, bahwa salah satu kunci pokok keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas sesuai dengan kebutuhan daerah.

Sumber daya manusia merupakan organ perencana sekaligus yang menjalankan misi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dengan memanfaatkan

segala kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para personil. Sarana dan prasarana yang memadai tidak akan ada artinya bila tidak tersedia sumber daya manusia yang mampu menggunakannya, sebaliknya jumlah sumber daya manusia yang terlalu besar bukan merupakan suatu jaminan akan tercapainya tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa dibarengi kualitas memadai. Oleh karena itu. Dalam penelitian ini penyusun menyertakan bagaimana pemberdayaan sumber daya masyarakat Desa Lumbung Rejo guna mendukung Program Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong-Royong.

Selain sumber daya manusia, implementasi kebijakan menuntut tersedianya sumber daya yang lain, baik yang berupa dana maupun insentif. Oleh karena itu, salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah kemampuan dalam bidang keuangan karena tanpa sumber keuangan sendiri yang jelas, maka daerah tersebut tidak mungkin dapat melaksanakan suatu program.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini Pamudji dalam Josef Riwu Kaho menegaskan sebagai berikut:¹⁹

“Pemerintahan daerah tidak akan dapat melakukan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan...dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.”

Keuangan daerah merupakan aspek yang esensial untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah sangat dibutuhkan adanya pembiayaan. Mengenai posisi

¹⁹Kaho, Josef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali, Jakarta. 1988, hal. 65

pembiayaan ini, dapat diketahui dari penjelasan UU Nomor 25 Tahun 1999 sebagai berikut :

“....untuk mendukung penyelenggara otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proposional yang diwujudkan dengan peraturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan Pemerintah Daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan. Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah....”

Kegiatan-kegiatan pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya sebagai daerah otonom harus didukung dengan ketersediaan dana yang memadai. Seluruh pembiayaan kegiatan atau aktivitas pemerintah daerah itu tertuang dalam anggaran daerah atau yang lebih dikenal dengan nama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan cerminan dari keadaan keuangan daerah secara keseluruhan, karena anggaran tersebut menggambarkan bagaimana daerah memperoleh sumber-sumber keuangannya dan bagaimana pula daerah menggunakannya. APBD merupakan produk politik pemerintah daerah, yang mencerminkan apa-apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu setahun yang akan datang.

Saragih menyatakan bahwa, dalam pengelolaan keuangan daerah atau anggaran pada saat ini telah mengikuti paradigma yang berkembang yaitu dalam pengelolaan keuangan modern yang dapat diterapkan (*applicable*) oleh Pemerintah Daerah. Perubahan paradigma ini seiring dengan pencanangan konsep *good governance* dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip pengelolaan

keuangan daerah harus mengacu pada transparansi, efisisensi, efektivitas, akuntabilitas, dan partisipatif.²⁰

Berdasarkan pemahaman seperti itu, terdapat sumber dana yang dimiliki oleh Pemkab Sleman untuk melaksanakan kewenangan Program Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong-Royong yang berasal dari APBD, serta sumber dana yang berasal dari pemerintah/propinsi DIY dalam rangka tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai kewenangannya.

c. Sikap Pelaksana

Organisasi (birokrasi pemerintah) pelayanan publik di tengah arus perubahan yang sedemikian kompleks tersebut, sebagaimana dijelaskan di atas memerlukan sumber daya manusia yang mampu meningkatkan peran serta dan kinerja agar optimal dalam transformasi pelayanan publik. Situmorang mengatakan sebagai berikut :²¹

“Untuk mengatasi kondisi sumber daya manusia yang demikian diperlukan upaya-upaya yang sistematis dalam meningkatkan kapasitasnya agar mampu bekerja secara optimal kepada masyarakat. Hal itu hanya mungkin tercapai melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur Pemerintah Daerah dalam berbagai aspek, baik aspek intelektual, manajerial dan perilaku.”

Di dalam implementasi Program Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong-Royong, yang dimaksudkan sikap, meliputi sikap pelaksana yaitu keinginan atau kesepakatan di kalangan pelaksana (implementors) untuk melaksanakan berbagai

²⁰ Saragih, Juli Panglima, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 7

²¹ Wasistiono, *Manajemen Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah*, STPDN Depdagri, Bandung, 2002, hal. 16

ketentuan yang berkaitan dengan implementasi. Sikap ini termasuk menaati apa yang seharusnya dikerjakan dan mampu melaksanakan.

Dalam kaitannya dengan implementasi Program Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong-Royong, sikap dari pelaksana (implementor) diwujudkan dalam semangat dan kemauan yang kuat untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam rangka mensukseskan pelaksanaan kebijakan/program tersebut. Apabila pelaksana tidak menunjukkan sikap yang serius atau komitmen yang kuat untuk mematuhi peraturan yang ada, maka kemungkinan besar pelaksanaan kebijakan atau program akan mengalami kendala.

Sikap atau komitmen tersebut didasari oleh persepsi yang merupakan sesuatu yang bersifat sangat pribadi dan merupakan dasar tindakan atau perilaku seseorang terhadap rangsangan yang berasal dari lingkungan atau dari luar dirinya. Persepsi merupakan proses dengan mana seseorang mengorganisasikan dalam pikirannya, menafsirkan, mengalami, dan mengolah pertanda atau segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya. Bagaimana segala sesuatu tersebut mempengaruhi persepsi seseorang, nantinya akan pula mempengaruhi sikap atau perilaku yang akan dipilih.

Di dalam implementasi Program Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong-Royong yang dilaksanakan oleh LKMD Lumbung Rejo, sikap merupakan perilaku pelaksana yang berhubungan dengan penilaian seseorang terhadap ketentuan yang ada dalam kebijakan atau program tersebut. Secara teoritis seperti telah disampaikan oleh para ahli di atas, penilaian tersebut akan melahirkan beberapa pilihan sikap dan tindakan yang akan dilakukan, sehingga antara seseorang dengan orang lainnya akan

mungkin sekali berbeda dalam menentukan pilihan sikap dan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap kebijakan atau program tersebut.

Penilaian yang mendasari sikap salah satunya adalah kenyataan bahwa adanya tambahan penghasilan atau intensif. Hal ini dimaksudkan guna mendorong produktifitas kerja pegawai menjadi lebih tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan, banyak organisasi memberikan intensif sebagai bagian dari sistem imbalan yang berlaku bagi pegawai pemerintah.

Sikap pelaksana diwujudkan pula dengan melibatkan kelompok dalam masyarakat di berbagai wilayah terhadap tujuan kebijakan/program, sehingga tindakan aparat pelaksana memainkan peran yang cukup penting dalam proses implementasi. Dalam kaitan ini dilema yang biasanya dihadapi oleh pejabat publik yang berusaha untuk mengubah perilaku dari satu atau lebih kelompok masyarakat adalah bahwa derajat dukungan publik atas kebijakan berbeda-beda dari waktu ke waktu.

Perubahan sikap pelaksana dan kelompok masyarakat terjadi apabila kebijakan yang dijalankan selama ini telah membebani dan membatasi akses penghidupan mereka, dan secara alami akan terjadi penolakan. Tugas yang amat penting dari para birokrat daerah adalah menjabarkan dukungan yang tadinya meluas menjadi suatu kekuatan masyarakat yang turut menentukan dalam keputusan kebijakan. Untuk itu, sangat penting juga untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat Desa Lumbung Rejo mengenai pelaksanaan Program Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong-Royong.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Kata “daya” mengesankan arti “usaha, tangguh, kuat”. Jadi pemberdayaan bisa juga berarti suatu usaha untuk menumbuhkan sifat tangguh, kuat atau potensi yang ada pada sesuatu. Sedangkan masyarakat adalah suatu kelompok, dalam arti luas merupakan bagian atau anggota suatu tatanan yang jelas seperti Negara, kerajaan atau suku. Jadi pemberdayaan masyarakat adalah suatu usaha untuk memaksimalkan, menggali atau menumbuhkan potensi masyarakat secara keseluruhan sehingga bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun orang lain.²²

Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang paling dikenal di Indonesia adalah gotong royong. Gotong royong disebut juga kerja sama merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama. Gotong royong adalah sifat dasar yang dimiliki bangsa Indonesia. Mulai dari sistem pertanian secara bersama, acara kenduri, membangun rumah, dan segala macam kegiatan kemasyarakatan. Semuanya menunjukkan bahwa gotong-royong sudah ada sejak zaman prasejarah di bumi Indonesia.

D. DEFINISI KONSEPTIONAL

Agar dapat memberikan gambar yang lebih jelas serta untuk menghindari kesalahpahaman istilah-istilah penting sehubungan dengan pokok masalah dalam penelitian ini, maka perlu diberikan pengertian tentang definisi-definisi konsep sebagai berikut :

²² *Arti dan Definisi Pemberdayaan*, Perpustakaan Online Indonesia

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah satuan aparat Negara yang berwenang memerintah suatu kesatuan wilayah tertentu, yang berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Negara.

2. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah keputusan dalam rangka mencapai tujuan social masarakat, yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang menghubungkan antara rencana dengan tujuan yang telah di terapkan. Dengan kata lain, implementasi merupakan proses penerjemahan pernyataan kebijakan dalam aksi kebijakan.

5. Implementasi Program

Implementasi program adalah rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah kebijakan ditetapkan, yang meliputi pengambilan keputusan, langkah-langkah operasional yang strategis untuk mewujudkan program menjadi kenyataan.

6. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu usaha untuk memaksimalkan, menggali atau menumbuhkan potensi masyarakat secara keseluruhan sehingga bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun orang lain.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Menurut Saifudin Anwar, definisi operasional adalah bahasa atau definisi suatu variabel agar tidak terjadi ambiguous yaitu memiliki makna ganda atau tidak memasukan indicator yang jelas.²³

Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi Program Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong-Royong yang dilaksanakan di Desa Lumbung Rejo yang meliputi :
 - a. Perencanaan pembangunan Desa Lumbung Rejo dengan Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong-Royong.
 - b. Pelaksanaan pembangunan Desa Lumbung Rejo dengan Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong-Royong.
 - c. Alokasi Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong-Royong.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong-royong dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut :
 - a. Organisasi Pelaksana : interaksi antara organisasi yang terlibat serta kejelasan tugas dan peran masing-masing dalam mendukung Program Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong-Royong.

²³ Anwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 1998, hal. 59

- b. Sumber Daya : sumber daya manusia maupun sumber dana dalam mendukung tercapainya pelaksanaan Program Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong-Royong. Desa Lumbungrejo.
- c. Sikap Pelaksana : kesungguhan seluruh stakeholder baik implementator maupun masyarakat Desa Lumbung Rejo terhadap pelaksanaan Program Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong-Royong.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan penyusun dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang atau memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah, data-data, yang dikumpulkan disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.²⁴ Adapun bentuk metode yang digunakan adalah studi kasus, dalam hal ini penyusun mengambil studi kasus tentang pelaksanaan Program Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong Royong di Desa Lumbungrejo.

2. Unit Analisis

Istilah unit analisis ini disamakan dengan unit penelitian atau unit elementer. Unit analisis adalah unit dari mana informasi dikumpulkan, dan sekaligus sebagai basis untuk

²⁴ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, CV. Tarsita, Bandung, 1980, hal. 33.

melakukan analisis dan menarik kesimpulan. Unit analisis menunjuk pada karakteristik khusus yang berkaitan dengan obyek atau tujuan penelitian.²⁵

Bertolak dari sasaran penelitian ini yaitu , pelaksanaan Program Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong Royong di Desa Lumbungrejo, maka yang menjadi unit analisis adalah LKMD dan Karang Taruna Desa Lumbung Rejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman.

3. Data yang Dibutuhkan

Untuk keperluan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan sumber data yang dibutuhkan yaitu :

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh melalui wawancara, meliputi pembicaraan dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian secara langsung maupun tidak langsung dan observasi secara langsung, dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis berbagai fenomena yang muncul.²⁶ Sumber data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data mengenai:
 1. Implementasi Program Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong-Royong di Desa Lumbungrejo.
 2. Kelembagaan LKMD (Lembaga Kemasarakat Desa) Lumbungrejo.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan yang diperlukan seperti dokumentasi, dengan cara menghimpun sumber-sumber yang ada.²⁷ Sumber data sekunder

²⁵ Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi-UGM, Yogyakarta, 1986, hal. 140

²⁶ *Ibid*, hal. 126

²⁷ *Ibid*, hal. 126

yang diperlukan antara lain produk-produk hukum nasional, peraturan daerah, serta bahan pustaka.

Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini mengenai gambaran daerah penelitian yang meliputi keadaan geografis, demografis dan prasarana daerah yang dibutuhkan untuk penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian dapat menggunakan berbagai macam instrumen seperti :

a. Dokumentasi.

Menurut Winarno Surachmad yang memberikan pengertian dokumentasi sebagai berikut :²⁸

Kita dapat merumuskan pengertian dokumentasi; sebagai laporan tertulis dari suatu peristiwa, yang isinya terdiri atas sesuatu penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa itu dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau merumuskan keterangan mengenai peristiwa tersebut.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan sumber primer sebagai sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama diantaranya dalam bentuk Profil Desa Lumbung Rejo serta data-data pendukung mengenai pelaksanaan Program Dana Bantuan Kemasyarakatan Gotong-Royong di Desa Lumbungrejo Tahun 2008.

b. Interview

²⁸ *Ibid*, hal. 125

Adapun teknik interview yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah interview dengan cara membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan atau panduan wawancara untuk disajikan kepada responden dalam penelitian ini antara lain :

1. Kepala Desa Lumbungrejo
2. Pengurus LKMD Lumbungrejo
3. Beberapa masyarakat Desa Lumbungrejo

c. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi observasi diartikan :²⁹

Sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap obyek yang diselidiki dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan dengan mata kepala saja, melainkan juga semua jenis pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi yang penyusun lakukan selama penelitian ini menghasilkan gambaran-gambaran yang terjadi di lapangan dan kemudian di deskripsikan sesuai faktanya.

5. Teknik Analisis Data

Sebagaimana disampaikan di atas, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, meskipun data yang dipergunakan bersifat kuantitatif, analisis yang digunakan adalah dengan cara melakukan interpretasi terhadap data, fakta dan informasi yang telah dikumpulkan dengan langkah-langkah sebagai berikut :³⁰

- a. Pengumpulan data, yang dilakukan melalui wawancara, studi pustaka, dokumentasi dan observasi.

²⁹ *Ibid*, hal. 136

³⁰ *Ibid*, hal. 140

- b. Penelitian data, yang dilakukan berdasarkan prinsip validitas, obyektivitas, reliabilitas melalui cara mengkategorikan data dengan sistem pencatatan yang relevan dan melakukan kritik atas data yang telah dikumpulkan dengan teknik triangulasi.
- c. Interpretasi data, yang dilakukan dengan cara menganalisis data dengan pemahaman intelektual yang dibangun atas dasar pengalaman empiris terhadap data, fakta, dan informasi yang telah dikumpulkan dan disederhanakan dalam bentuk tabel/grafik.
- d. Kesimpulan terhadap hasil interpretasi data.